



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

Pit. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. ADHARI, S.T., M.E.
NIP. 19761123 200212 1 005



Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 **“Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi”**: (contoh :untuk indikator yang berhasil dicapai)

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Formulasi Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilai}}$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 3.20; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 4.11 Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 128.44%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 3.14 terjadi peningkatan sebesar 0.97%.

2. Capaian sasaran strategis 2 **“Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral”**:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Laju pemanfaatan data sektoral (%), Formulasi Perhitungan :
$$= (n + 1) - n/n \times 100\% \quad (n = \text{data tahun awal})$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 70%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 70%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 55% terjadi kenaikan sebesar 15%.

3. Capaian sasaran strategis 3 **“Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE”**:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), Formulasi Perhitungan : *Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1 = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI*

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program penyelenggaraan persandian

untuk pengamanan informasi.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 3, sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 3.4. Dengan demikian capaian ini melebihi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 113.33%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 2 terjadi kenaikan sebesar 170%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Membuat inovasi dalam upaya meningkatkan komunikasi dan pembinaan serta asistensi kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan ketersediaan informasi di seluruh Badan Publik dalam implementasi keterbukaan informasi agar dapat mempertahankan predikat Kategori Informatif Kepulauan Bangka Belitung;
2. Meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang lebih menyeluruh kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas dan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan Kerjasama, koordinasi dan keterpaduan dalam pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE yang didasarkan pada peta proses bisnis antar PD dan Pemerintah Daerah lainnya.
4. Mengintegrasikan dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan satu data Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan.
5. Perlunya peningkatan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Teknis Statistik Sektoral yang berkaitan dengan Penerapan Proses Bisnis Kegiatan Statistik untuk menambah pengetahuan Pengolah dan Pengumpul Data OPD mengenai Rekomendasi dan Metadata Statistik Sektoral.
6. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel keamanan informasi masih yaitu meningkatkan kesadaran untuk mengamankan informasi, membuat tata kelola dan regulasi keamanan informasi dan melakukan bimbingan teknis untuk sumber daya pengamanan informasi.
7. Membuat kebijakan-kebijakan teknis dan operasional serta Meningkatkan terus Kompetensi ASN.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.3 Isu-isu Strategis.....	7
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024	15
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	23
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	37
3.4. Inovasi.....	38
3.5. Penghargaan.....	39
3.6. Crosscutting.....	40
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Rekomendasi.....	42
4.3 Rencana Aksi.....	43
LAMPIRAN	43

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	11
Tabel I.3	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024	12
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel II.3	Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	15
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	17
Tabel II.5	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja	18
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu	19
Tabel II.7	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu	19
Tabel II.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua	20
Tabel II.9	Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua	21
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran 1	25
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	26
Tabel III.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024	27
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran 2	30
Tabel III.7	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	31
Tabel III.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024	32
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan sasaran 3	33
Tabel III.10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	33
Tabel III.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024	34
Tabel III.12	Anggaran dan realisasi belanja langsung per sasaran	36
Tabel III.13	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	37



Daftar Gambar

Gambar I.1	Cascading Kinerja	2
Gambar I.2	Peta Proses Bisnis	3
Gambar I.3	Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika	3
Gambar I.4	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
Gambar II.1	Website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi	22
Gambar III.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	28
Gambar III.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	29
Gambar III.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	30
Gambar III.4	Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	32
Gambar III.5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	35

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

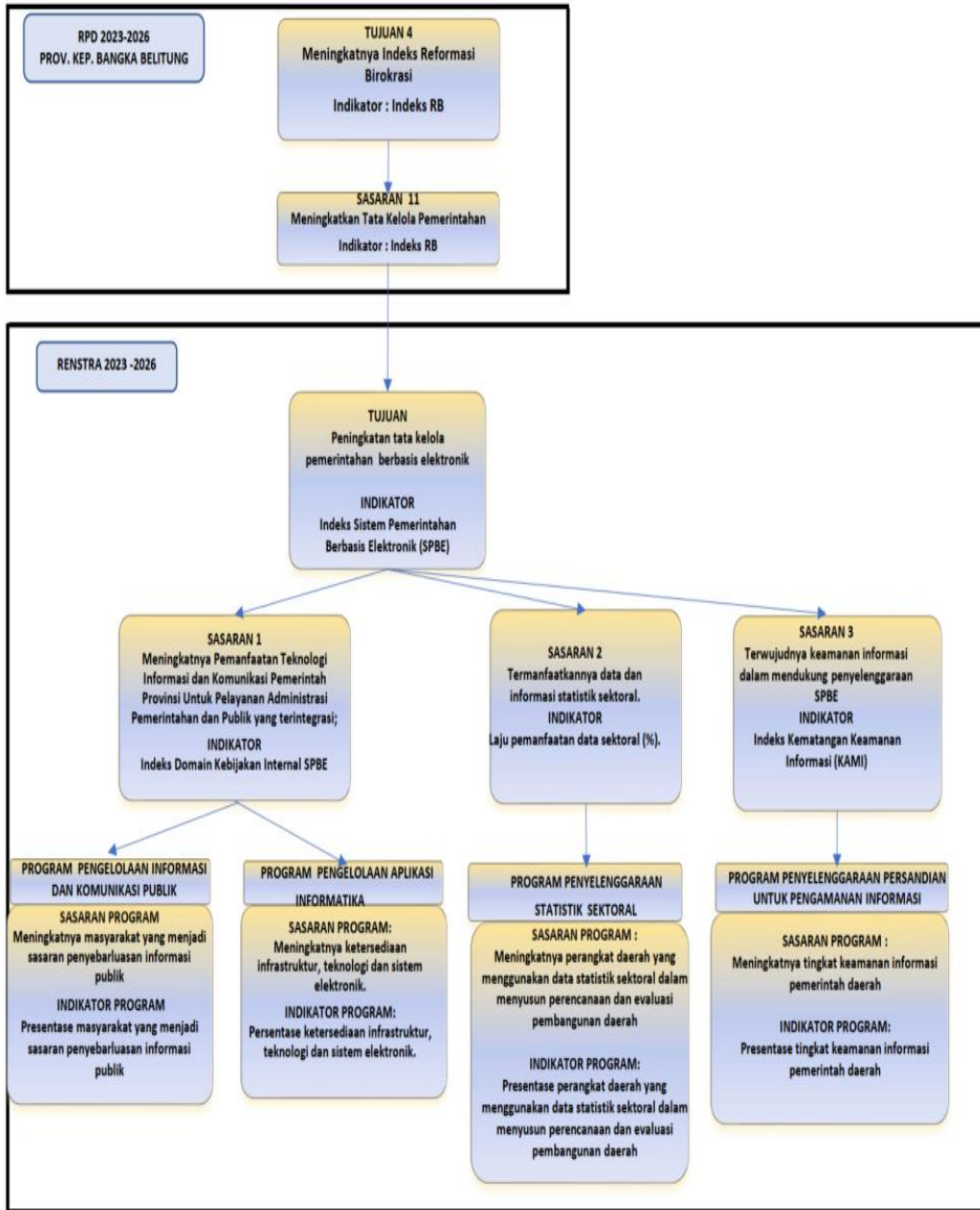
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 *Cascading Kinerja*

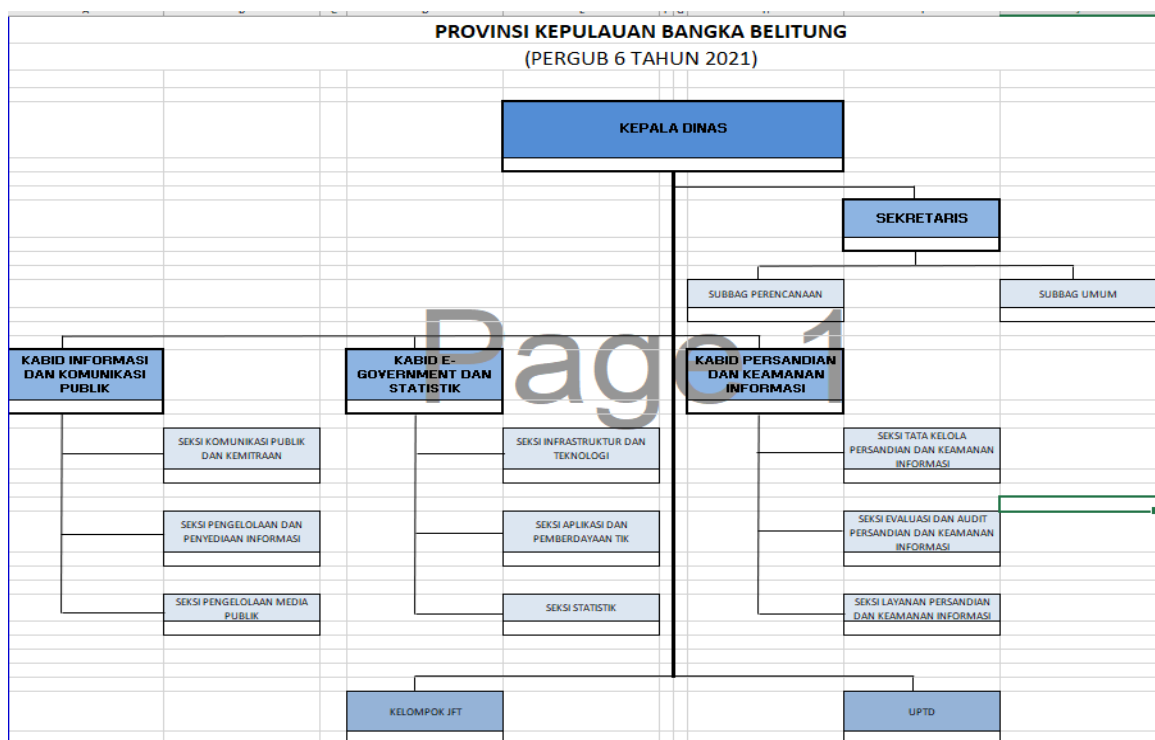


Sumber : RPD 2023 - 2026, Renstra Diskominfo Prov. Kep. Babel 2023 - 2026

Gambar I.2 Peta Proses Bisnis

IDENTIFIKASI PETA PROSES							
PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROSES (KODE)	SUB PETA	STRATEGI PROGRAM PROGRAM	KODE	PETA LINTAS FUNGSI CFM	BIDANG	
Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik (KOMINFO.01)	KOMINFO.01.01	Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KOMINFO.01.01 CFM.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	IKP	
Meningkatnya layanan penerapan e-Government (KOMINFO.02)	KOMINFO.02.01	Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	KOMINFO.02.01 CFM.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	
Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik (KOMINFO.03)	KOMINFO.03.01	Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	KOMINFO.03.01 CFM.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Daerah Provinsi	E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (KOMINFO.04)	KOMINFO.04.01	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KOMINFO.04.01 CFM.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	STATISTIK PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	
Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah (KOMINFO.05)	KOMINFO.05.01	Meningkatnya Akutabilitas PD serta Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO.05.01 CFM.01	Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah Melalui perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.02	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	SEKRETARIAT	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.03	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO.05.01 CFM.04	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO.05.01 CFM.05	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO.05.01 CFM.06	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT	

Gambar I.3 Struktur Organisasi



1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.4.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Adapun PD Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;5. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;6. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;9. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PETA JABATAN	
JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
Jabatan Struktural	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Kepala Dinas	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
Sekretaris Dinas	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	PENATA LAPORAN KEUANGAN
Kabid E-Government dan Statistik	BENDAHARA
Kabid Persandian dan keamanan Informasi	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
Kepala Sub Bagian Umum	VERIFIKATOR KEUANGAN
Subkoordinanotor Perencanaan/Perencana Ahli Muda	PENGELOLA KEPEGAWAIAN

Subkoordinantor Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi/ Manggala Informatika ahli Muda	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Subkoordinantor Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi/ Manggala Informatika Ahli Muda	PENGADMINISTRASI UMUM
Subkoordinantor Layanan Persandian dan Keamanan Informasi/ Sandiman Ahli Muda	ANALIS PUBLIKASI
Subkoordinantor Infrastruktur dan Teknologi/ Pranata Komputer Ahli Muda	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI
Subkoordinantor Aplikasi dan Pemberdayaan/ Pranata Komputer Ahli Muda	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Subkoordinantor Statistik/ Statistisi Ahli Muda	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
Subkoordinantor Pengelolaan Media Publik/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	JURNALIS
Subkoordinantor Pengelolaan dan Penyediaan Informasi/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	ANALIS SISTEM INFORMASI
Subkoordinator Komunikasi Publik dan kemitraan /Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
Jabatan Fungsional	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI
JF MANGGALA INFORMATIKA MADYA	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN
JF SANDIMAN MADYA	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI
JF PRANATA KOMPUTER MADYA	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
JF PRANATA HUMAS MADYA	ANALIS DATA DAN INFORMASI
JF STATISTISI MADYA	PENGELOLA DATA STATISTIK
JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI
JF MANGGALA INFORMATIKA MUDA	ANALIS TATA KELOLA KEAMANAN SIBER
JF SANDIMAN MUDA	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI
JF PRANATA KOMPUTER MUDA	PENGOLAH DATA KEAMANAN SIBER DAN SANDI
JF PRANATA HUMAS MUDA	ANALIS PERSANDIAN
JF STATISTISI MUDA	PENGELOLA DATA PERSANDIAN

JF. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	
JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	
JF ARSIPARIS PENYELIA	
JF PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN /MAHIR	
JF PRANATA HUMAS PELAKSANA/TERAMPIL	
JF PRANATA HUMAS PERTAMA	
JF PRANATA HUMAS PENYELIA	
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA	
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	
PRANATA KOMPUTER MAHIR	
JF STATISTISI PERTAMA	
STASTISI PENYELIA	
STASTISI MAHIR	
STASTISI TERAMPIL	
JF MANGGALA INFORMATIKA PERTAMA	
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	
JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	
JF MANGGALA INFORMATIKA PELAKSANA	
JF SANDIMAN PERTAMA	
SANDIMAN PENYELIA	
SANDIMAN MAHIR	
SANDIMAN TERAMPIL	

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas”**, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan good governance yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku PPID Utama Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE

di Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Meningkatnya layanan penerapan e-Government, Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat;
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE, Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JML	KUALIFIKASI				JML	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A	JABATAN STRUKTURAL												
1	Jabatan Tinggi Pratama	1		1			0						
2	Jabatan Administrator	4		4			3	2	1			3	
3	Jabatan Pengawas	1		1			1		1				1
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Manggala Informatika Ahli Madya	2		2			0						
2	Pranata Komputer Ahli Madya	2		2			1	1				1	
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2		2			0						
4	Statistisi Ahli Madya	1		1			0						
5	Sandiman Ahli Madya	1		1			0						
6	Manggala Informatika Ahli Muda	4		4			2	2				2	
7	Pranata Komputer Ahli Muda	6		6			6	6				4	2
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	7		7			5	3	2			1	4
9	Statistisi Ahli Muda	3		3			1	1					1

10	Sandiman Ahli Muda	3		3			1			1		1	
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		1			1		1			1	
12	Perencana Ahli Muda	1		1			1			1		1	
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1		1			0						
14	Manggala Informatika Ahli Pertama	1		1			0						
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	5		5			1		1				1
16	Statistisi Ahli Pertama	1		1			0						
17	Sandiman Ahli Pertama	1		1			0						
18	Pranata Komputer Penyelia	4			4		0						
19	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	2			2		0						
20	Statistisi Penyelia	1			1		0						
21	Sandiman Penyelia	1			1		0						
22	Pranata Komputer Mahir	3			3		2		1	1		1	1
23	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	3			3		2		1	1			2
24	Statistisi Mahir	1			1		0						
25	Sandiman Mahir	1			1		0						
26	Pranata Komputer Terampil	2			2		0						
27	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2			2		0						
28	Statistisi Terampil	1			1		0						
29	Sandiman Terampil	1			1		0						
30	Arsiparis Mahir	1			1		1			1		1	
31	Manggala Informatika Pelaksana	1			1		0						
							0						
C	JABATAN PELAKSANA						0						
1	Penata Laporan Keuangan	1		1			1		1			1	
2	Bendahara	2			2		2		2			1	1
3	Verifikasi Keuangan	3			3		2			2			2
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1		1			0						
5	Pengelola Sarana dan Prasarana	1			1		0						
6	Pengelola Kepegawaian	1			1		1			1			1
7	Pengadministrasi Umum	2				2	0						
8	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1		1			1		1			1	
9	Pengelola Program dan Kegiatan	1			1		0						
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1				1	0						
11	Analisis Tata Kelola Keamanan SIBER	1		1			0						
12	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1			1		0						
13	Pengelola Data Keamanan SIBER dan Sandi	1			1		0						
14	Pengendali Teknologi Informasi	3		3			2		2			2	
15	Analisis Persandian	1		1			0						
16	Pengelola Data	1			1		1			1			1

	Persandian											
17	Pengawas Teknologi Informasi	1		1			1		1			1
18	Pengelola Sistem dan Jaringan	1			1		0					
19	Penata Teknologi Informasi Komputer	1				1	1			1		1
20	Analisis Data dan Informasi	2		2			1			1		1
21	Pengelola Data Statistik	1			1		0					
22	Analisis Publikasi	2		2			2		2			2
23	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	2				2	2				2	2
24	Pengolah Informasi dan Komunikasi	2				2	2				2	1
25	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2		2			1		1			1
26	Jurnalis	3			3		2			2		2
27	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	2				2	2				2	
28	Analisis Sistem Informasi	1		1			0					
D	PPPK/PHL											
	PPPK											
1	Pranata Komputer Ahli Pertama	4		4			4			4		3
	PHL											
1	Caraka	2				2	2			1	1	2
2	Petugas Kebersihan	3				3	3				3	2
3	Sopir	2				2	1				1	1
4	Satpam	2				2	2				2	2
5	Staf Administrasi	8		3		5	8		5		3	6
6	Informasi Teknologi (Fotografer/Vidiografer)	5		5			5		5			4
7	Pengelola Media	6		6			6			4	2	6
8	Operator Call Center	2			2		1		1			1
9	New Anchor	1		1			1		1			
10	Penyiar Radio	5		3	2		4		2		2	3

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 32 orang (35,96%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang (16,85%), D3 sebanyak 22 orang (24,72%), dan SLTA sebanyak 20 orang (22,47%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		Rp. 20.132.935
	tanah	1	Rp. 20.132.935
2	Peralatan dan mesin		
	alat besar	3	Rp. 535.852.250,-
	alat angkutan	5	Rp. 93.588.9124
	alat bengkel dan alat ukur	2	Rp. 6.986.850
	alat pertanian	-	
	alat kantor dan rumah tangga	-	Rp.3.950.550.697
	alat studio, komunikasi dan pemancar	-	Rp. 3.133.589.699
	alat kedokteran dan kesehatan	-	
	alat laboratorium	-	
	alat persenjataan	-	
	komputer	-	Rp. 11.651.078.230
	alat eksplorasi	-	
	alat pengeboran	-	
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	
	alat bantu eksplorasi	-	
	alat keselamatan kerja	-	
	alat peraga	-	
	peralatan proses/produksi	-	
	rambu – rambu	-	
	peralatan olah raga	-	
3	Gedung dan bangunan		Rp. 5.297.523.417
	bangunan gedung	5	Rp. 4.403.923.417
	monumen	-	
	bangunan menara	1	Rp.893.600.000
	tugu titik kontrol/pasti	-	
4	Jalan, irigasi dan jaringan		Rp. 144.500.000
	jalan dan jembatan	-	
	bangunan air	1	Rp. 134.000.000
	instalasi	2	Rp. 10.500.000
	jaringan	-	
5	Aset tetap lainnya		
	bahan perpustakaan	-	
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra	-	
	hewan	-	
	biota perairan	-	
	tanaman	-	
	barang koleksi non budaya	-	
	aset tetap dalam renovasi	-	
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Rp. 49.800.000
	konstruksi dalam pengerjaan	1	Rp. 49.800.000
7	Aset Lainnya		Rp. 1.122.682
	Aset tak berwujud	22	Rp. 1.122.682
	Total		

Kendaraan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 2 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang

tunggu, ruang laktasi, dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadamkebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personalkomputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 4 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 65 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	Rp 26.277.025.964	Rp. 1.169.930.892	-	-	Rp. 27.446.956.856
2024	Rp. 20.459.639.747	Rp. 314.090.500			Rp. 20.773.730.247

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan Total anggaran belanja sebesar Rp 6.673.226.609,- Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan.

Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah **Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)** Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama empat tahun adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;;
2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.
4. Meningkatkan Tata Kelola Internal PD

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	-	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%		55	70	85	100	100	
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai		3	3	4	4	4	
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah/Nilai Sakip PD	nilai		82	83	84	85	85	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana induk SPBE. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi. 4. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui diseminasi open data. 3. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi. 4. Penguatan pengelolaan dan peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral; 2. Meningkatkan diseminasi data badan publik. 	
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah; 2. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah. 3. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan 	

		persandian daerah.	
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja 2. Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja; 4. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. 2. Penguatan kapasitas SDM. 3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1 Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10,979,407,368.00	10,579,851,147.00	(399,556,221.00)
	1.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127,516,900.00	40,000,000.00	(87,516,900.00)
	1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,838,679,663.00	8,536,827,953.00	698,148,290.00
	1.1.3	Kegiatan Administrasi Barang milik daerah pada Perangkat Daerah	21,991,112.00	8,432,012.00	(13,559,100.00)
	1.1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	3,000,000.00	(47,000,000.00)
	1.1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255,170,771.00	182,798,587.00	(72,372,184.00)
	1.1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	419,895,795.00	-	(419,895,795.00)
	1.1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,783,826,227.00	1,720,223,995.00	(63,602,232.00)
	1.1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482,326,900.00	88,568,600.00	(393,758,300.00)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	1.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5,733,449,100.00	5,067,574,800.00	(665,874,300.00)
		1.2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5,733,449,100.00	5,067,574,800.00	(665,874,300.00)
		1.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5,753,235,900.00	4,894,283,600.00	(858,952,300.00)
		1.3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	367,920,000.00	266,500,000.00	(101,420,000.00)
		1.3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5,385,315,900.00	4,627,783,600.00	(757,532,300.00)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
3	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	221,390,200.00	188,020,700.00	(33,369,500.00)
		1.4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	221,390,200.00	188,020,700.00	(33,369,500.00)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	152,898,264.00	44,000,000.00	(108,898,264.00)
		1.5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	144,898,264.00	36,000,000.00	(108,898,264.00)
		1.5.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	8,000,000.00	8,000,000.00	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				22,840,380,832.00	20,773,730,247.00	(2,066,650,585.00)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 050/2.3/DISKOMINFO/2025 tanggal 02 Januari 2025 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	2.8	Triwulan I	0.5
					Triwulan II	0.6
					Triwulan III	0.7
					Triwulan IV	0.9
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%	70	Triwulan I	10
					Triwulan II	20
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	10
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	3

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 5,733,449,100	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 5,753,235,900	Bidang Egovernment dan Statistik
3	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 221,390,200	Bidang Egovernment dan Statistik
4	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 152,898,264	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5	Nilai Sakip PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 10,979,407,368	Sekretariat

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reuiu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	2.8	Triwulan I	0.5
					Triwulan II	0.6
					Triwulan III	0.7
					Triwulan IV	0.9
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%	70	Triwulan I	10
					Triwulan II	20
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	10
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	3

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 5,067,574,800	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4,894,283,600	Bidang Egovernment dan Statistik
3	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 188,020,700	Bidang Egovernment dan Statistik

4	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 44,000,000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5	Nilai Sakip PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 10,579,851,147	Sekretariat

2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	2.8	Triwulan I	0.5
					Triwulan II	0.6
					Triwulan III	0.7
					Triwulan IV	0.9
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%	70	Triwulan I	10
					Triwulan II	20
					Triwulan III	30
					Triwulan IV	10
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3	Triwulan I	
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	3

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 5,067,574,800	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4,894,283,600	Bidang Egovernment dan Statistik
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 188,020,700	Bidang Egovernment dan Statistik
4	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 44,000,000	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5	Nilai Sakip PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 10,579,851,147	Sekretariat

Keterangan Tambahan:

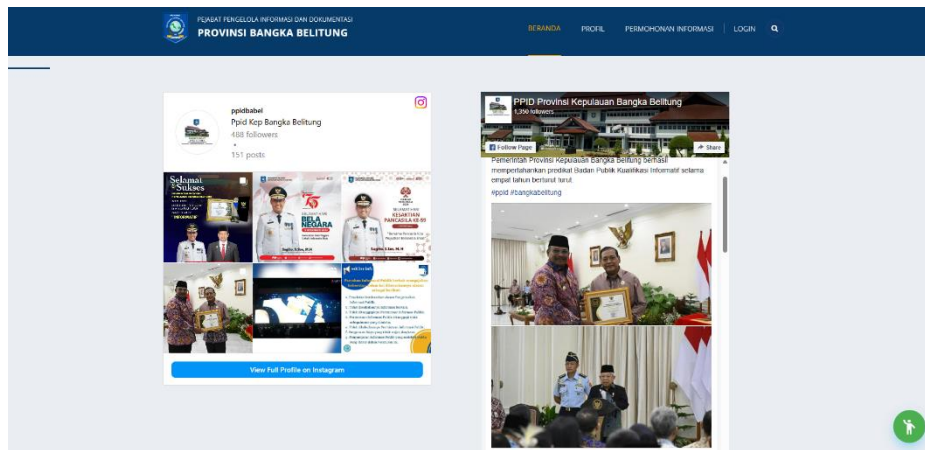
1. tetapi anggaran berkurang 9.05% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat [Di](#) dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online masyarakat.

Kemudian Instrumen pendukung penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah website PPID Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Website PPID Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan data dukung informasi penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan Pemda.

Gambar II.1. Website Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gambar aplikasi <https://kominfo.babelprov.go.id/>



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran
3. Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP 2023
4. Inovasi
5. Penghargaan
6. Crosscutting

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	6	6	7	8	$9=8/7*100\%$	10	11=7
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	2.70	3.14	2.80	4.11	147%	SGT BAIK	3.00
		<u>Formula Perhitungan:</u> =(Jumlah total domain)/(Jumlah 4 area penilaia)								
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral	%	35	55	70	70	100%	SGT BAIK	100

		<u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> $= \frac{(n+1)-n}{n} \times 100\%$ (n=data tahun awal)								
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai		367/2.6	3	3.6	120%	SGT BAIK	4
		<u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1 = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI								

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan indikator Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	$= \frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilaian}}$

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan
$$= \frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilaian}}$$
 Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 4.11 atau sebesar 146.79% dari target 2.80. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2.7	3.14	116.30	2.8	4.11	146.79	3	137.00

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4.11 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 146.79 % (kolom 8) (terlampau).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 116.30% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi mengalami peningkatan sebesar (30.49)% capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** dengan sasaran program Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mempunyai Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi / jumlah penduduk x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100 atau sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh :

- Ketersediaan dan peran media serta saluran-saluran komunikasi diantaranya berupa media cetak/surat kabar, media elektronik (TV dan Radio) dan media baru (website dan Media sosial) yang membantu dalam menyebarkan sekaligus menerima informasi dan pesan-pesan baik dari dan kepada internal pemerintah maupun dari dan kepada masyarakat luas
- Tersedianya anggaran untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik meskipun dengan jumlah yang masih terbatas tetapi masih mampu mendukung berjalannya program pengelolaan informasi dan komunikasi public dengan baik.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Kurangnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah belum optimal.

2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik mempunyai Indikator kinerja Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD yang terlayani infrastruktur teknologi/keseluruhan layanan X 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 80%. **Target Tahun 2024 tercapai disebabkan oleh beberapa alasan seperti**

- Optimalisasi Data center sebagai Implementasi dari kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi pemerintahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Pengembangan aplikasi dipemerintahan untuk mempermudah integrasi data dan efisien dari sisi anggaran untuk operasional maupun pemeliharannya,
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait aplikasi yang dikembangkan yang dilaksanakan secara efektif dan intensif.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih kurangnya tenaga IT yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aplikasi, pengembangan atau pemeliharaan,
- Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi dukungan atas pembelian software, hardware serta layanan lain yang diperlukan..

Tabel III.5.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi / jumlah penduduk x 100%	*	100	*	100	*	100
2.	Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik Jumlah PD yang terlayani infrastruktur teknologi/keseluruhan layanan X		100		100		100

100%							
------	--	--	--	--	--	--	--


- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik berada diatas Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik berada diatas Target Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 100 % dan capaian indikator Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik sama dengan capaian Nasional yaitu sebesar 100 %

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melekat pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 5.067.574.800,-

Gambar III.1
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>pelaksanaan pengembangar penyediaan informasi publik dan pengolahan permohonan informasi publik</p> <p>Diskominfo Provinsi selaku yang mengelolaa PPID Utama dan atasar PPID Utama (Sekda Prov Kep Babel dalam mengikuti Uji Publik Money Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik dan berhasil bertahar dalam kategori "Informatif"</p>

2.		<p>pelaksanaan perencanaan dan persiapan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal dan pembuatan konten lokal</p> <p>Diskominfo Provinsi melakukan Produksi Konten di pulau terluar Bangka Belitung, Kepulauan Pongol dalam hal mendukung campaign “Babel semakin Cakap Digital” yang di gaungkan oleh Pemerintah Pusat “Cakap Digital”</p>
----	---	---

3.1.1.2 Data Dukung Capaian Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melekat pada Bidang E-Government dan Statistik kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 266.500.000,-
 - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 4.627.783.600,-

Gambar III.2

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Reviu Penyusunan To Be Arsitektur SPBE SIA
2.		Penyetingan zoom di ruang zoom bkpsdm dalam acara kedatangan menteri

Gambar III.3
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Bimbingan Teknis Ruang Digital “Sistem Pengambilan Keputusan Atau Sistem Pakar Berbasis Artificial Intelligence”
2.		Pemindahan server dr IDC ke NDC

predikat indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaiberikut:

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4.2 – 5.0	Memuaskan
2	3.5 - < 4.2	Sangat Baik
3	2.6 - < 3.5	Baik
4	1.8 - < 2.6	Cukup
5	< 1.8	Kurang

3.1.2. Sasaran : Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral

Kinerja sasaran Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral diukur dengan indikator Laju pemanfaatan data sektoral Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektora	'=(n+1)-n/n)x 100% (n=data tahun awal)

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan '=(n+1)-n/n)x 100%

(n=data tahun awal) Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 70% dari target 70%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Laju pemanfaatan data sektoral	55	55	100	70	70	100	100	70

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 70 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (kolom 8) (terlampau).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 55% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Laju pemanfaatan data sektoral mengalami peningkatan sebesar (15)% capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Laju pemanfaatan data sektoral peningkatan capaian tersebut didukung dari program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran program Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah formula perhitungan indikator ini adalah $=(n+1)-n/n \times 100\%$ (n=data tahun awal) Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 70% dari target 70 atau sebesar 100%.

Capaian ini didukung oleh :

- Koordinasi serta Dukungan dari OPD dalam penyampaian data serta Dukungan Badan Pusat Statistik dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi
- Kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan statistik sektoral,
- Ketersediaan data yang akurat dan relevan dalam mendukung analisis statistik.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan, pengolahan dan Analisa data,
- Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi kegiatan pengumpulan data serta pengembangan system informasi statistik.

Tabel III.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Laju pemanfaatan data sektoral '=(n+1)-n/n)x 100% (n=data tahun awal)	*	70	*	70	*	100

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Laju pemanfaatan data sektoral berada diatas Target Nasional.
- b. Sebagai kesimpulan capaian indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 100 %.

3.1.2.2. Data Dukung Capaian Laju pemanfaatan data sektoral melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral melekat pada Bidang E-Government dan Statistik pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 188.020.700,-

Gambar III.4
Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024
2.		

3.1.3. Sasaran : Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE

Kinerja sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE diukur dengan indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	= Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI

Kinerja sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 3.6 dari target 3. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	2.85	95.00	3	3.6	120	100	70

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut:

- Tercapai 3.6 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 120 % (kolom 8) (terlampau).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 80% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Laju pemanfaatan data sektoral mengalami peningkatan sebesar 5% capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan capaian Indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) peningkatan capaian tersebut didukung dari program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran program Meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah daerah formula perhitungan indikator ini adalah = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 3.6 dari target 3 atau sebesar 120%.

Capaian ini didukung oleh :

- Kelembagaan sudah cukup optimal dan sesuai,
- Dukungan lembaga pengampu (BSSN) dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi,
- Semangat ASN dalam mengembangkan diri dan berkontribusi dalam bidang yang baru dikembangkan cukup membantu.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang persandian yang memiliki keahlian khusus,
- Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi pengadaan software, hardware dan layanan keamanan informasi yang diperlukan.

Tabel III.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI	*	3	*	3.6	*	120

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) berada diatas Target Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 3.

3.1.3.2. Data Dukung Capaian Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi melekat pada Bidang Persandian dan keamanan informasi pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi di Lingkup Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 36.000.000,- dan kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 8.000.000,-

Gambar III.5
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Provinsi di Lingkup Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>pembinaan ke persandiar banka tengah terkait pembentukan CSIRT dan optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi dalam rangka implementasi aplikasi Cyber Chat</p>
2.		<p>Kegiatan pengamanan sinyal (jamming) wapres acara peresmian pasar modern Toboali</p>

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
					Realisasi			Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2.8	4.11	146.79	9,961,858,400	9,844,704,641	98.82%	117,153,759.00
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral	70	70	100	188,020,700	186,199,929	99.03%	1,820,771.00
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	3.6	120.00	44,000,000	43,651,074	99.21%	348,926.00
Total Belanja Langsung						10.193.879.100	10.074.555.644	99.02%	0.98% (efisiensi)

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika .Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024*

Berdasarkan tabel III.12 di atas capaian kinerja sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 10.193.879.100,- (kolom 7), terealisasi Rp 10.074.555.644,- kolom 8) atau 99.02 % kolom 9) sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 0.98% yang bersumber dari:

- Sisa Belanja Barang dan jasa
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Dll.

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel III.13 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/104/LHE/ITDA/2024. perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan rencana aksi kinerja agar memuat data realisasi target kinerja secara berkala serta menyusun hasil monev atas rencana aksi 2. Dokumen IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026 memuat Definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian kinerja 3. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 	<p>Dinas komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. 3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 4. Komitmen Pemerintah

		Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika, statistiK dan persandian 5. Motivasi dalam pencapaian IKK maupun IKI
--	--	--

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi Lapor Yak , untuk layanan aspirasi pengaduan secara online dan responsive dalam pelayanan public,
- c. Aplikasi SPBE yang terdiri dari Aplikasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik, merupakan aplikasi PPID (Pemantauan informasi publik), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi public yang dimiliki pemerintah provinsi serta Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi rencana umum pengadaan) untuk mengumumkan rencana pengadaan dan memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi.
- d. Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan mewujudkan akuntabilitas pemerintah dan mempermudah public dalam mengakses dan menggunakan data serta menghasilkan system

pemerintahan yang transparan,

- e. Portal Tim CSirt-Babelprov memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: *cyber security drill test; workshop* atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

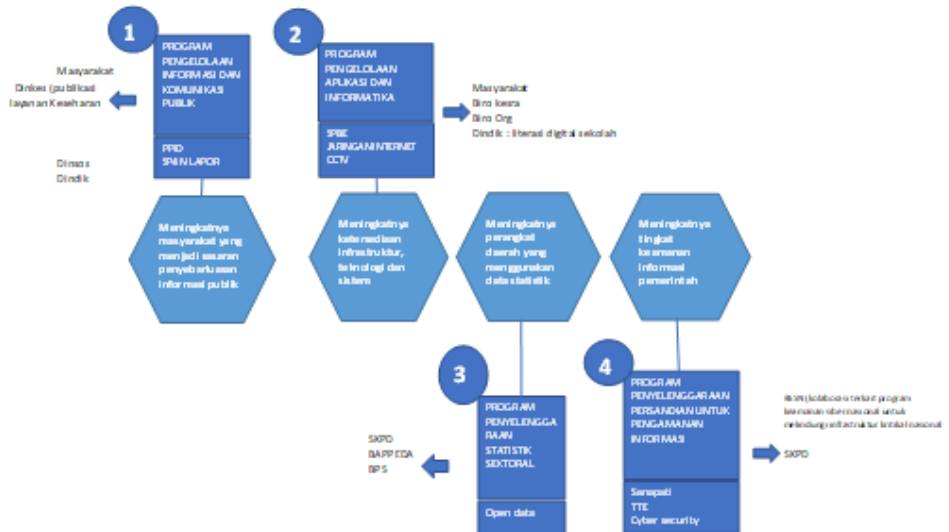
3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,
2. Terbaik II Kategori Media Audiovisual dalam Anugerah Media Humas Tahun 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
3. Terbaik I Kategori Iklan Layanan Masyarakat dalam KPID Award 2024 dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Nominasi 6 Besar Kategori Media Sosial dalam Anugerah Media Humas Tahun 2024 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
5. Nominasi 6 Besar Kategori kampanye Komunikasi Publik dalam Anugerah Media Humas Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
6. Nominasi 6 Besar Kategori website Komunikasi Publik dalam Anugerah Media Humas Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE tercapai dengan presentase 146,79%, dan indikator kinerja Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) tercapai dengan presentase 120%.
2. untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari visi yang jelas dari pemimpin untuk membangun pemerintahan yang berbasis digital untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya jaringan internet yang cepat dan stabil, regulasi yang mendukung dalam pengembangan SPBE. terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan adanya sosialisasi yang efektif serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan berbasis elektronik dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan untuk mendukung program kegiatan Dinas komunikasi dan informatika dalam upaya penerapan teknologi dan informasi.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan visi pimpinan agar lebih jelas mendukung penuh tentang transformasi digital dalam upaya peningkatan Indeks SPBE dan Indeks KAMMI
2. Memaksimalkan implementasi Perda/Pergub Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2025 Tentang APBD tahun 2025 dengan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk efektivitas penggunaan anggaran serta tercapainya tujuan pembangunan daerah.
3. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan terkait dengan pengelolaan data, keamanan siber serta pengembangan aplikasi.
4. Pengembangan infrastruktur TIK berupa ketersediaan jaringan internet yang memadai dan stabil diseluruh wilayah, meningkatkan kapasitas data center sesuai standar yang ada, Update perangkat lunak dan perangkat keras.
5. Pengembangan aplikasi dan layanan berbasis TIK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Peningkatan keamanan siber berupa kebijakan yang komprehensif, penerapan system keamanan yang kuat seperti firewall, anti virus dll.
7. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala serta menetapkan indicator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih intensif.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif melalui berbagai media dan saluran komunikasi, mengadakan forum konsultasi public secara berkala untuk menjangkau aspirasi masyarakat.
5. Membangun system informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan data, monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3.14	4.11		
		Termanfaatnya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%).	55%	70%		
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2.8	3.6		

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
VISI PERANGKAT DAERAH : Babel Sejahtera Provinsi Maju Yang Unggul dibidang Inovasi, Agropolitan, dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat dan Berbasis Teknologi
MISI PERANGKAT DAERAH : Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)
TUJUAN PERANGKAT DAERAH : - Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%).
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)
4.	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
Pembina Utama Madya
NIP 19640915 199002 1 002

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M.Si
 Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640915 199002 1 002

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domian Kebijakan Internal SPBE	2,8	$\frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilaian}}$
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	70	$\frac{-(n+1)+n}{n} \times 100\%$ (n=data tahun awal)
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	$\frac{\text{Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1}}{\text{Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI}}$
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	65	Penilaian Kemapanan RB

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Domian Kebijakan Internal SPBE	a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.733.449.100,-	APBD
		b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.753.235.000,-	APBD
2.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 221.390.200,-	APBD
3.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 152.898.264,-	APBD
4.	Nilai RB Perangkat Daerah	Program Penunjang Unsur Pemerintah daerah Provinsi	Rp. 10.979.407.368,-	APBD

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. SAFRIZAL ZAKARIA ALI, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,




Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640915 199002 1 002



Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
 UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 54 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Bala Sertifikasi Elektronik (BSiE), BSSN

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disertai dengan Berita Acara



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSDINAR, S.IP
 Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
 Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

S (td2)

Sugito, S.Sos, M.H

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK PERTAMA,
Pjt. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



GUSDINAR, S.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Tata kelola SPBE	3,2	$\frac{\text{Jumlah total nilai 3}_{\text{tahun}}}{3}$
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	70	$\frac{n(n+1)-n(n)}{n \times \text{data tahun awal}} \times 100\%$
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	$\frac{\text{Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1} \times \text{Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI}}{\text{Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI}}$

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 5.067.574.800,-	APBD-P
		b. Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 5.894.283.600,-	APBD-P
2.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 188.020.700,-	APBD-P
3.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persiapan untuk Pengamanan Informasi	Rp. 44.000.000,-	APBD-P

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Rp. 10.579.851.147,-	APBD-P

Pangkalpinang, 11 November 2024
 PIHAK PERTAMA,
 Pj. GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

S (td2)

Sugito, S.Sos, M.H

Pj. KEPALA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



GUSDINAR, S.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 1 Tahun 2024

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW I	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW I	REALISASI TW I	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	3.2				Penilaian dilakukan oleh Kempanan RB secara periodik di bulan agustus	Bidang E-Government dan Statistik
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	persen	70	10%	10%	100	-	Bidang E-Government dan Statistik
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Bidang Persandian dan keamanan Informasi
4	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Predikati RB Perangkat Daerah	nilai	82				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Sekretariat

Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	3.2				Penilaian dilakukan oleh Kempanan RB secara periodik di bulan agustus	Bidang E-Government dan Statistik
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	persen	70	15	28		-	Bidang E-Government dan Statistik
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Bidang Persandian dan keamanan Informasi
4	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Predikati RB Perangkat Daerah	nilai	82				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Sekretariat

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2024

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW III	REALISASI TW III	%		
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi.	Indeks Domian Kebijakan Internal SPBE	nilai	3,2				Penilaian dilakukan oleh Kempen RB secara periodik di bulan agustus	Bidang E-Government dan Statistik
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	persen	70	20%	27%	-		Bidang E-Government dan Statistik
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai	3				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Bidang Persandian dan keamanan Informasi
4	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Frekuensi RB Perangkat Daerah	nilai	82				Penilaian dilaksanakan setelah tahun berjalan	Sekretariat

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2024

LAPORAN MONEV
RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategik	Indikator Kinerja Sasaran Strategik	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian						
1	Peningkatan data basis pemerintahan berbasis elektronik	Memingkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi.	Indeks Domian Kebijakan Internal SPBE	2,8	4.11	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menyadari sasaran pelayanan informasi publik	100%	100%	Meningkatnya pemerkayaan sarana pelayanan informasi publik pada	Presentase penyebaran informasi kebijakan/program/hagatan pimpinan dan perngat di daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia	70%	70%						
														TW 1	0,5	TW 1	10	TW 1	10
														TW 2	0,6	TW 2	20	TW 2	20
														TW 3	0,7	TW 3	35	TW 3	20
														TW 4	0,9	TW 4	50	TW 4	20
2	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi dan sistem elektronik	Indeks Domian Kebijakan Internal SPBE	2,8	4.11	PROGRAM PENGELOLAAN ARKAS INFORMATIKA	Presentase jumlah layanan infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	100%	100%	Tercapainya indeks SPBE	Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	50%	50%							
													TW 1	0,5	TW 1	10	TW 1	5	
													TW 2	0,6	TW 2	20	TW 2	10	
													TW 3	0,7	TW 3	30	TW 3	15	
													TW 4	0,9	TW 4	35	TW 4	20	
3	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	70	70	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	60%	60%	Meningkatnya Data Informasi statistik daerah	Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia	75%	75%							
													TW 1	10	TW 1	10	TW 1	15	
													TW 2	15	TW 2	15	TW 2	20	
													TW 3	20	TW 3	25	TW 3	25	
													TW 4	30	TW 4	30	TW 4	15	
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	65%	65%	Tercapainya indeks kematangan keamanan informasi	Persentase Penerapan Protokol Keamanan Informasi Pemerintah	85%	85%							
													TW 1	5	TW 1	15	TW 1	15	
													TW 2	15	TW 2	20	TW 2	20	
													TW 3	20	TW 3	25	TW 3	25	
													TW 4	25	TW 4	25	TW 4	25	

Lampiran 5. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023



